

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tulisan ini ingin mengkaji pengembangan UMKM yang selama menjadi permasalahan utama di dalam peningkatan perekonomian masyarakat di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Malang. Kebijakan pemerintah yang mengatur terkait dengan PSBB, PPKM mikro berdampak terhadap produktifitas dan menurunnya angka jual UMKM, disamping itu pada tahun 2020 di awal pandemi covid-19 menyerang seluruh aktifitas masyarakat termasuk UMKM dihentikan akibatnya pendapatan masyarakat pedagang kaki lima produktifitasnya terhambat. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Desa (OPD) atau Dinas Koperasi dan UMKM untuk melahirkan sebuah solusi di dalam pemulihan produktifitas UMKM.

Pandemi Covid-19 yang telah menyerang Indonesia setidaknya hampir selama 2 tahun lamanya sangat berdampak terhadap negara. Covid-19 telah membuat dampak yang sangat besar terhadap segala aspek kehidupan yaitu mulai dari perubahan pola aktivitas, kesehatan, pendidikan, perekonomian, sosial dan juga politik. Dampak tersebut cukup dirasakan pula di tingkat daerah, contohnya adalah Kabupaten Malang. Dari segi perekonomian Kabupaten Malang merupakan daerah dengan perekonomian yang cukup baik, namun semenjak adanya pandemi dari segi perekonomian Kabupaten Malang mengalami penurunan. Banyak masyarakat yang mengalami pengurangan pegawai akibat dampak dari pandemi covid-19 dan tidak hanya itu dari segi UMKM nya juga mengalami penurunan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang kerap kita sebut UMKM adalah salah satu bentuk dari praktik usaha yang cukup populer di kalangan masyarakat. UMKM dapat disebut juga sebagai kegiatan usaha atau bisnis produksi barang dan jasa yang dijalankan oleh individu, kelompok, dan bahkan badan usaha kecil. Banyak masyarakat di Kabupaten Malang yang bergerak di bidang UMKM ini dan bahkan juga menjadikan UMKM sebagai salah satu roda penggerak perekonomian dalam sektor bisnis, sehingga jika di bidang UMKM mengalami penurunan maka secara otomatis perekonomian juga akan terdampak pula. Berbagai peran penting juga dilakukan UMKM seperti menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi

kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan serta mengatasi masalah arus urbanisasi yang berlebih.

UMKM membutuhkan tata kelola yang baik untuk mengatur proses pengembangan tersebut. Dalam perkembangannya, berbagai macam kendala yang dihadapi oleh UMKM seperti keterbatasan modal, teknologi, kesulitan dalam pemasaran, keterbatasan dalam mengakses informasi tentang peluang pasar, sumber daya manusia (tenaga kerja) yang memiliki soft skill rendah. Untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan UMKM maka diperlukan peran pemerintah agar memberikan pelatihan atau mengedukasi masyarakat sehingga dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat, selain itu bantuan modal untuk pengembangan usahanya sangat diperlukan apalagi di masa pandemi covid-19 seperti ini, serta bantuan teknologi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan juga kuantitas produk mereka. Sektor pengelolaan UMKM cenderung dimanajemen sendiri sehingga produktivitas usahanya sangat rendah. Upaya dalam mensinergikan UMKM dapat dilakukan melalui tata kelola (*good governance*) yang baik, pola kemitraan serta memperkuat struktur ekonomi baik nasional maupun daerah (Wulansari, Wahyu and Kurniawan, 2017).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tahun 2016-2021 juga dijelaskan terkait kebijakan yang memuat terkait UMKM yaitu yang pertama mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing sedangkan Usaha Skala Mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkembangkan wirausaha baru keunggulan prima untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga mengembangkan koperasi dan UKM untuk lebih berperan sebagai penyedia barang dan jasa di pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor (Penyusunan, Pelaksanaan and Pembangunan, 2021).

Akibat dari adanya pandemi covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan himbuan kepada masyarakat untuk tetap berdiam diri di rumah guna mengantisipasi peningkatan kasus covid-19 yang menimbulkan dampak cukup besar terhadap kestabilan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan kebijakan PSBB serta PPKM mikro dan hal ini sangat berdampak terhadap UMKM. Kebijakan ini semakin membuat keadaan pelaku UMKM sangat

kesulitan. Akibat dari pandemi covid-19 ini menyebabkan perubahan terhadap pola pembelian konsumen dan tentunya hal tersebut berdampak juga terhadap berjalannya bisnis UMKM. Menurunnya penjualan serta keinginan konsumen untuk membeli sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Modal yang dikeluarkan oleh pihak UMKM bisa saja berhenti dan tidak balik modal dikarenakan tidak adanya transaksi sehingga bisa menyebabkan suatu usaha menjadi berhenti dan mati. Meskipun dalam keadaan pandemi ada UMKM yang tetap memproduksi barang dengan harapan produk tersebut dapat terjual namun tidak seperti dulu sebelum adanya pandemi, pameran UMKM dapat dilakukan dengan bebas sehingga para pelaku UMKM ini dapat dengan leluasa menjual dan mengenalkan produk buatan tangan mereka sendiri. Keadaan yang membuat masyarakat harus berdiam diri di rumah karena adanya pembatasan dan kebijakan pemerintah yang menghimbau untuk tidak keluar rumah sehingga membuat konsumen tidak mungkin untuk berlama-lama di luar rumah hanya untuk membeli suatu produk. Selain itu, akibat dari pandemi covid-19 membuat minat masyarakat untuk membeli sesuatu yang bukan suatu kebutuhan pokok atau bisa dikatakan sangat penting menjadi menurun dan sangat kecil. Hal tersebut membuat para pelaku UMKM harus menyusun ulang strategi bisnisnya agar dapat mengakomodasi efek dari pandemi covid-19.

Sebagai kelompok usaha kecil, UMKM sering kali terjebak dalam problem keterbatasan modal, teknik produksi, pemasaran, manajemen dan juga teknologi. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam rangka memperluas peranannya di dalam perekonomian nasional, diperlukan serangkaian pembinaan terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut terutama bersumber pada masalah keterbatasan pengetahuan, informasi, dan permodalan (Sulistyo, 2010). Di daerah Kabupaten Malang sendiri menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan terhadap persoalan tersebut. Kehadiran pandemi covid-19 sangatlah berdampak khususnya terhadap para pelaku usaha mikro. Terdapat lima faktor yang telah mempengaruhi lesunya pelaku usaha mikro di Kabupaten Malang. Lima faktor yang menjadi penyebab turunnya kegiatan usaha mikro dan juga ultra mikro di Kabupaten Malang yang pertama adalah penjualan yang menurun akibat dari daya beli masyarakat yang anjlok, yang kedua terdapat kesulitan bahan baku, yang ketiga kegiatan distribusi yang terhambat, yang keempat ialah faktor financial kekurangan modal, dan

yang terakhir yaitu para pelaku usaha mikro yang telah mengalami masalah produksi (Agus Supriyadi, 2020).

Di masa pandemi Covid-19, jumlah UMKM Kabupaten Malang per 31 Juli 2020 berkurang menjadi 425 ribu. Penurunan jumlah UMKM ini memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat terutama di desa (Fizriyani, 2020). Hasil kajian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang terhadap 686 UMKM selama pandemi covid-19 menunjukkan bahwa permasalahan mendasar yang dialami UMKM di Kabupaten Malang akibat pandemi covid-19 adalah: Penjualan turun (44%); permodalan (27%); distribusi terhambat (12%); kesulitan bahan baku (9%) dan mengalami masalah produksi (8%) penurunan omzet penjualan UMKM mencapai (77,6%); penurunan aset mencapai (42,7%) dan pengurangan tenaga kerja mencapai (46,1%) (Islami, Supanto and Soeroyo, 2021).

Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang hingga bulan Juli 2020, menyebutkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sebanyak 10.824 berkas. Tujuan dari IUMK sendiri adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya serta mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya. Namun, dari 10.824 para pelaku usaha mikro tersebut tidak semuanya terkena dampak akibat covid-19. Dari hasil pendataan diketahui total ada 1.327 pelaku usaha mikro yang terkena dampak covid-19 dan mengalami kesulitan, 268 pelaku usaha mikro diantaranya sudah memiliki IUMK, sedangkan sisanya sebanyak 1.059 pelaku usaha mikro belum memiliki IUMK (Sarwoko, 2009). Sejauh ini Kabupaten Malang memiliki 425.061 usaha kecil, menengah dan mikro, termasuk 252.075 pelaku usaha dalam kategori mikro, 172.109 usaha kecil, dan 1.377 usaha menengah, dengan total penyerapan tenaga kerja 630.188 (Tirtana *et al.*, 2020). Berdasarkan data yang terdaftar dalam website online UMKM Kabupaten Malang, terdapat 57 UMKM dengan 4.702.147 pekerja (Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020).

Melihat kondisi yang sedemikian rupa, pemerintah yang bertindak sebagai fasilitator harus dapat segera mengambil tindakan dan membuat strategi agar keadaan UMKM di Kabupaten Malang dapat tetap berjalan dan juga berkembang di tengah wabah yang sedang merajalela, sehingga kestabilan ekonomi Kabupaten Malang masih dapat terjaga dengan baik. Peranan penting pemerintah terlibat ke dalam lima wujud utama yaitu, yang pertama selaku

stabilisator sangat penting dan juga harus dimainkan secara efektif. Kedua, selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Ketiga, selaku modernisator pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat ke arah kehidupan yang modern. Keempat, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah selaku pelaksana itu sendiri, pemerintah masih dituntut untuk berperan sebagai pelaksana sendiri dari berbagai kegiatan yang ada (Soedjito, 2018).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pemerintah harus dapat lebih menjaga UMKM dari keterpurukan yang semakin parah dengan cara pemerintah membuat kebijakan-kebijakan sehingga UMKM dapat tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selain kebijakan, pemerintah Kabupaten Malang tentunya harus bisa memajemen pelayanan publik yang diberikan agar memberikan hasil yang baik serta memuaskan untuk masyarakat terutama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

UMKM harus mendapatkan prioritas penanganan karena bersifat sebagai penopang perekonomian di daerah Kabupaten Malang dan hingga nasional serta berperan penting pula dalam memperluas serapan tenaga kerja. Ketika pemerintah memberikan strategi perkembangan UMKM serta bantuan, maka hal tersebut juga dapat membantu pemerintahan itu sendiri guna meningkatkan perekonomian pemerintah Kabupaten Malang. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang juga dapat mengurangi jumlah masalah pengangguran di Kabupaten Malang. Dukungan Pemerintah Kabupaten Malang di lapangan juga memerlukan perhatian agar tepat sasaran dan juga dapat sesuai dengan harapan.

Program yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah berupa memfasilitasi pelaku UMKM di Kabupaten Malang dengan menyediakan website serta aplikasi melalui umkm.co.id dan *umkm pasti bisa*. Perbedaan dari website dan aplikasi ini yaitu, website umkm.co.id mencakup seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Malang dengan berbagai skala. Dan jika aplikasi *umkm pasti bisa* dikhususkan bagi pelaku UMKM yang sudah lolos kurasi atau seleksi, yang Pemerintah siapkan untuk naik kelas agar bisa mengikuti market place digital. Website dan aplikasi tersebut berguna untuk memantau bagaimanakah perkembangan dari mereka, karena cakupannya cukup penting. Sebelum adanya pandemi covid-19, ruang interaksi antara penjual dan pembeli di masyarakat merupakan pasar

tradisional ataupun pasar modern, sehingga dapat terjadi transaksi perdagangan dan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat interaksi sosial di dalamnya.

Sehingga setelah terjadinya pandemi covid-19 Pemerintah Kabupaten Malang berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk ruang interaksi antara pembeli dan penjual di masyarakat dengan di bentuknya dua aplikasi tersebut, sehingga upaya *good governance* yang di harapkan oleh Pemerintah dapat terlaksana. Upaya *good governance* tersebut diwujudkan dalam akuntabilitas pemerintahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Dalam hal ini maksudnya adalah akuntabilitas yang merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya public untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiscal, manajerial, dan program, sehingga Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dalam hal ini sebagai kepala atau ketua yang harus dapat mengelola sumber daya manusia atau staff Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang untuk berkewajiban mengelola dengan baik program yang dimilikinya, yaitu yang merupakan membuat program Aplikasi UMKM Pasti Bisa, sebagai strategi pengembangan UMKM saat pandemic covid-19.

Di dalam aplikasi UMKM Pasti Bisa terdapat beberapa produk yang memuat kategori makanan 217 produk, fashion 120 produk, minuman 96 produk dan handycraft sebanyak 106 produk. Produksi UMKM dalam aplikasi UMKM Pasti Bisa merupakan produk yang termasuk dalam kebutuhan nasional, selain itu melalui aplikasi UMKM Pasti Bisa produk UMKM Kabupaten Malang dapat dilihat hingga mancanegara. UMKM Kabupaten Malang memiliki usaha tentu saja dikarenakan untuk meningkatkan perekonomian, dan peningkatan perekonomian tersebut tidak hanya berimbas terhadap keluarga saja namun berimbas terhadap daerah bahkan nasional. Pemanfaatan produk yang terdapat dalam UMKM terdaftar dalam aplikasi UMKM Pasti Bisa bersumber dari segala pemanfaatan bahan yang ada, seperti halnya handycraft pemanfaatannya berasal dari benang rajut selain itu terdapat juga UMKM yang bergerak di bidang makanan menjual kecap sehingga pemanfaatan bahan yang dilakukan adalah berasal dari kedelai hitam.

Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Malang telah mengusulkan puluhan ribu penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Puluhan ribu penerima BPUM tersebut telah didata serta disinkronkan dan juga dikumpulkan. Dilakukan pendataan dan sinkronisasi agar akurat dan aktual perkembangannya, sehingga bisa

dipantau juga oleh dinas terkait. Target dari pemberian BPUM ini adalah pelaku UMKM dapat lebih mandiri.

Urgensi yang dimiliki UMKM Kabupaten Malang di masa pandemi ini adalah terkait modal usaha. Namun, sayangnya para pelaku UMKM harus bersabar untuk mendapatkan modal usaha. Sebab bantuan modal usaha dari Pemerintah Pusat tersebut menurun, dikarenakan anggaran yang seharusnya dikucurkan untuk pelaku UMKM harus dialihkan untuk penanganan covid-19. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Pantjaningih Sri Redjeki, sebelum adanya pandemi covid-19 pelaku UMKM di Kabupaten Malang mendapatkan jatah Rp.2,4 juta per bulan, tapi setelah masuk pada Pandemi Covid-19 turun menjadi Rp.1,2 juta per bulan dan dana tersebutlah yang dikucurkan melalui program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Sedangkan dana yang diterima oleh pelaku UMKM di masa pandemi ini hanya satu kali. Dan penurunan bantuan modal itu, karena saat ini masih dalam kondisi pandemi covid-19 yang mana anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19. Bantuan modal bagi pelaku usaha mikro tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dan dalam aturan tersebut Kementerian Koperasi dan UMKM diamanatkan 11 agenda, sehingga melalui peraturan pemerintah tersebut Dinas Koperasi dan UMKM memfasilitasi para pelaku UMKM yang salah satunya dengan penyelenggaraan data tunggal melalui pemberian BPUM (Helmi Supriyatno, 2021).

Sehubungan dengan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait “Pengembangan Sektor UMKM Berbasis Digital Untuk Peningkatan Perekonomian di Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan sektor UMKM berbasis digital untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Malang ?
2. Apa faktor penghambat dalam pengembangan sektor UMKM berbasis digital untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengembangan sektor UMKM berbasis digital untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengembangan sektor UMKM berbasis digital untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi peneliti serta pembaca terkait pengembangan sektor UMKM berbasis digital untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Malang.

b. Secara Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini ingin memberikan gambaran terhadap pengembangan sektor UMKM berbasis digital untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Malang. Selain itu dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk turut serta mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) miliknya agar usaha yang dimiliki dapat tetap berdiri dan berkembang meskipun di era pandemi covid-19.

1.5 Definisi Konseptual

Pengertian definisi konseptual sendiri menurut Singarimbun dan Effendi (2001:121) adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yang harus didefinisikan agar nantinya peneliti serta pembaca dapat memiliki banyak pemahaman dengan mudah terkait maksud dari penelitian tersebut :

1. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan, bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM (Adhiningsih, As-Sahih and Oktamara, 2016). Pengembangan UMKM adalah salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. UMKM di Kabupaten Malang mempunyai potensi untuk menjadi penggerak perekonomian rakyat, potensi tersebut dapat dilihat dari jumlahnya yang sangat besar, berkembang setiap tahun dan berada di segala sektor ekonomi, mempunyai kemampuan menyerap tenaga kerja, sehingga diperlukan suatu strategi pengembangan yang tepat. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Anggraeni, Hardjanto and Hayat, 2013). Menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008)
2. Digitalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu upaya untuk mendigitalkan pemasaran produk-produk UMKM oleh pelaku UMKM. Secara

mudahnya, di zaman dengan teknologi yang semakin canggih telah memudahkan para pelaku usaha dalam memasarkan dan menjual produk-produknya secara online ('KKN-DR Kelompok 200 Desa Hinai Kanan Kabupaten Langkat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021', 2021). Digitalisasi dapat digunakan dalam penerapan operasional serta pemasaran dalam bidang umkm. Sistem pemasaran digital dapat membantu UMKM dalam menjangkau lebih banyak konsumen yang akan membeli produk dari UMKM tersebut melalui website maupun sosial media. Pelaku UMKM juga dapat merasakan kemudahan melalui penerapan digitalisasi pada operasional pelaku usaha tersebut. Digitalisasi juga mengarahkan konvergensi produk dan proses aplikasi informasi yang dapat melakukan berbagai fungsi audio-visual dan komputasi (Wuryantai, 2013). Digitalisasi informasi dalam masyarakat dapat melibatkan proses spesialisasi atau merupakan proses pemampatan terhadap batasan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Spesialisasi tersebut juga memiliki makna bahwa digitalisasi informasi memberikan perpanjangan institusi media dalam bentuk korporasi yang semakin besar dan juga efektif.

3. Peningkatan Perekonomian adalah suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah ke arah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari ekonomi yang sebelumnya (SYAMSIYAH, 2018). Peningkatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi adalah proses, cara, usaha atau kegiatan yang dilaksanakan untuk membuat ekonomi meningkat sehingga dapat menjadi lebih baik lagi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa ekonomi dari satu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan perekonomian ini dinilai sangat penting bagi suatu negara karena untuk meningkatkan kemampuan produksi serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Sukirno (2011:331) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. UMKM di Indonesia memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi dan penuntasan jumlah pengangguran, sekaligus juga dapat mendorong akselerasi pembangunan daerah (Siagian, 2021).

4. Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama, interaksi, serta kompromi yang berasal dari beberapa elemen yang terkait dengan individu, lembaga, dan atau pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung yang menerima akibat serta manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasing saying serta berbasis masyarakat. Berdasarkan kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi merupakan bentuk kerja sama khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Gray (1989) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berfikir dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan terhadap apa yang dapat dilaksanakan (Haryono, 2012).

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu atribut, nilai, atau sifat dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah terkait indikator serta konsep dari penerapan e-government sebagai berikut :

A. Pengembangan Sektor UMKM Berbasis Digital untuk Peningkatan Perekonomian Di Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang)

- 1. Kolaborasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dengan Pihak Swasta dalam Pengembangan Sektor UMKM**
- 2. Pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan untuk Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang**
 - a) Pelaksanaan Pelatihan Digitalisasi UMKM untuk Peningkatan Perekonomian Kabupaten Malang
 - b) Pengembangan Karakter Building pada Pelaku UMKM Kabupaten Malang
 - c) Pembinaan Wawasan Kewirausahaan terhadap UMKM Kabupaten Malang
 - d) Perencanaan Usaha dan Strategi Pemasaran terhadap UMKM di Kabupaten Malang

B. Dampak Pengembangan UMKM terhadap Peningkatan Perekonomian Kabupaten Malang

C. Faktor Penghambat Pengembangan Sektor UMKM Berbasis Digital

- a) UMKM yang Masih Belum Mandiri
- b) Luasnya Wilayah Kabupaten Malang

1.7 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini merupakan jenis metode penelitian yang bersifat deskriptif dan juga menggunakan analisis secara detail. Dalam pelaksanaannya, metode ini sifatnya subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus terhadap teori. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Sehingga penelitian kualitatif dalam hal ini dapat meneliti satu instansi atau dinas (dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang), tetapi secara menyeluruh yaitu mengenai seluruh faktor yang mungkin berhubungan dengan strategi pengembangan pemerintah Kabupaten Malang terkait UMKM di masa pandemi.

Dalam metode penelitian kualitatif, hasil analisis tidak tergantung berdasarkan jumlah tetapi berdasarkan data yang dianalisis dari berbagai pandangan. Penelitian yang dilakukan meliputi kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, serta analisis data.

b. Sumber Data Penelitian

Sumber data di dalam penelitian merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut berdasarkan kualitas dari suatu hasil penelitian. Oleh karena itu sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yang terdiri dari orang dan benda. Orang dalam hal ini bertindak sebagai informan yang berarti sebagai subjek untuk mengemukakan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, sedangkan benda merupakan sumber data yang berupa dokumen seperti artikel serta berita yang

mendukung tercapainya tujuan penelitian. Dalam penelitian ini juga terbagi menjadi dua sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara oleh seorang peneliti (dari tangan pertama). Bentuk dari data primer sendiri seperti berupa data hasil wawancara langsung, hasil survei dan juga dapat berupa kuesioner terhadap responden. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.

Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara yaitu dengan :

- a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang
 1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang
 3. Staff yang menangani terkait dengan UMKM
 - b. Pelaku UMKM Pasti Bisa Kabupaten Malang
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan juga yang tidak dipublikasikan.

Pada penelitian ini jawaban data sekunder diperoleh dari dinas, lembaga ataupun pihak-pihak yang ikut berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Pusat
- b. Peraturan Pemerintah Daerah
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- d. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang
- e. Referensi jurnal pembahasan terkait pengembangan sektor UMKM berbasis digital serta jurnal yang membahas terkait peningkatan perekonomian.

c. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan :

a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang
3. Staff yang menangani terkait dengan UMKM
4. Pelaku UMKM Pasti Bisa Kabupaten Malang

d. Teknik Pengumpulan

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengumpulan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data menjadi salah satu langkah yang amat penting dalam metode penelitian. Pengumpulan data di dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara seorang peneliti, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam hal ini penulis secara individu akan langsung terjun ke lapangan dan berada di tengah-tengah masyarakat guna memperoleh data dari informan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang serta pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Malang yang menjadi objek penelitian.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan orang serta lokasi dilakukannya penelitian. Observasi merupakan metode yang sifatnya akurat dan spesifik untuk pengumpulan data dan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan objek kajian dalam penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian yang diteliti adalah pengembangan sektor UMKM berbasis digital untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Malang. Untuk observasi yang peneliti lakukan untuk memperoleh

data tersebut dengan cara melakukan observasi terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang yang tentunya menangani terkait perkembangan UMKM di Kabupaten Malang.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara merupakan cara yang banyak digunakan oleh peneliti, sehingga metode ini sangat populer dilakukan dalam suatu penelitian. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh data yang berasal dari informan guna melengkapi data penelitian. Sebelum wawancara berlangsung ada baiknya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan yang terstruktur sesuai dengan alur pembicaraan saat wawancara terjadi. Dalam penelitian ini fokus wawancaranya adalah terkait pengembangan sektor UMKM berbasis digital untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Malang dan hal tersebut tentunya dilakukan kepada Kepala Dinas serta Kepala Bidang dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, selain itu wawancara akan dilakukan terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Malang dengan fokus wawancara terkait masalah apa yang mereka hadapi selama pandemi serta harapan para pelaku UMKM Kabupaten Malang terhadap pemerintah kedepannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen baik yang tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang terkait dengan penelitian. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa dipahami dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara induktif, yaitu analisis diawali dengan melakukan wawancara, pembahasan, bukti pendukung, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Menurut Creswell ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis data kualitatif, antara lain yaitu :

1. Analisis data kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan naratif lainnya. Proses analisis data kualitatif berjalan beriringan simultan dengan proses lainnya bahkan pada awal penelitian.
2. Pastikan bahwa proses analisis data kualitatif yang telah dilakukan berdasarkan pada proses reduksi data dan interpretasi. Data yang telah diperoleh direduksi ke dalam pola-pola tertentu, kemudian melakukan kategorisasi tema, kemudian melakukan interpretasi kategori tersebut berdasarkan skema-skema yang didapat.
3. Ubah data hasil reduksi ke dalam matriks. Dari matriks tersebut akan dilihat hubungan antara kategori data menurut subjek, informan, berdasarkan lokasi penelitian, demografis, waktu, dan perbedaan kategori lainnya.
4. Identifikasi prosedur pengodean (coding) digunakan dalam mereduksi informasi ke dalam tema-tema atau kategori yang ada.
5. Hasil analisis data yang telah melewati prosedur redaksi yang telah diubah menjadi bentuk matriks yang sudah diberi kode, selanjutnya disesuaikan dengan model kualitatif yang dipilih. Seperti fenomenologi, etnografi, atau studi kasus yang masing-masingnya memiliki kekhasan dan tujuan.